



**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2024**

**TARUTUNG  
2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan K/L yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya RPJM ini menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya sebagai dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) SKPD berupaya untuk terus melakukan pembenahan agar sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan terciptanya good governance di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini disusun untuk mewujudkan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024 seperti yang tertuang pada Rencana Strategis BPBD, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG CEPAT DAN TANGGAP AKAN BENCANA”** .

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2022, menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun atas berbagai Landasan Hukum, yaitu:

1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4286);
2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
23. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2010-2014;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 12 Tahun 2008 tentang Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **A. Maksud**

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2024 dalam prinsip tata pemerintahan yang baik.

### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf BPBD Kabupaten Tapanuli Utara dalam menentukan prioritas program kegiatan.
- b. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- c. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 4 (empat) bab.

### **Bab I Pendahuluan**

Merupakan Penjelasan, Latar Belakang Penulisan, Landasan Hukum Yang Memuat Maksud Dan Tujuan Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

### **Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Yang Memuat Informasi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu Serta Capaian Renstra SKPD.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Menjelaskan Mengenai Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD, Serta Program Dan Kegiatan.

## **Bab IV Penutup**

Merupakan Gambaran Kondisi Yang Diharapkan Untuk Pencapaian Pelaksanaan Renja Tahun 2024

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang didasarkan pada hasil pelaksanaan terhadap kinerja seluruh program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan dan merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja masukan, keluaran, hasil dan manfaat yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (terlampir kolom 6 dan 8) dan perkiraan Tahun berjalan 2024 diharapkan tidak berbeda dengan tahun 2024 dengan target pencapaian pelaksanaan 100 %. Hasil-hasil yang telah dicapai pada kegiatan Tahun 2023 merujuk kepada Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, OPD BPBD mengalami perubahan terutama pada program dan urusan.

Secara umum rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>			<b>100 %</b>		
	<b>Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>1.</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>9 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>15</b>	<b>78</b>
<b>2.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>4</b>	<b>72</b>
<b>3.</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>1 Tahun</b>		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>12 Bulan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100 %</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>90</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>60 bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>24</b>	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>100 %</b>	<b>1 Paket</b>	<b>2 Paket</b>	<b>100</b>
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>100 %</b>	<b>1 Paket</b>	<b>2 Paket</b>	<b>99</b>
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>100 %</b>	<b>1 Paket</b>	<b>2 Paket</b>	<b>100</b>
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>100 %</b>	<b>1 Paket</b>	<b>2 Paket</b>	<b>100</b>
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>12 Bulan</b>	<b>50 Dokumen</b>	<b>50 Dokumen</b>	<b>50 Dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>50 Dokumen</b>	<b>100 Dokumen</b>	<b>91</b>
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100 %</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>98</b>

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7 Unit</b>	<b>7 Unit</b>	<b>7 Unit</b>	<b>7 Unit</b>	<b>100 %</b>	<b>7 Unit</b>	<b>7 Unit</b>	<b>7 Unit</b>
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	<b>3 Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>100 %</b>	<b>3 Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>3 Unit</b>
2.	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	<b>4 unit</b>	<b>4 unit</b>	<b>4 unit</b>	<b>4 unit</b>	<b>100 %</b>	<b>4 unit</b>	<b>4 unit</b>	<b>4 unit</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100</b>
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100 %</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>87</b>
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan</b>								
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	<b>8 Unit</b>	<b>8 Unit</b>	<b>8 Unit</b>	<b>8 Unit</b>	<b>100 %</b>	<b>8 Unit</b>	<b>8 Unit</b>	<b>97</b>

2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	6 Unit	97
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>								
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	18 papan rambu kebencanaan	100 %	18 papan rambu kebencanaan	18 papan rambu kebencanaan	100 %			
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>								

1.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	2 Unit	100
2.	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	100 %	6 Kawasan	6 Kawasan	100
3.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personal TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerial	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100 %	10 orang	10 orang	100
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>								
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	2 laporan	100
1.	Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100
	Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100 %	5 Orang	5 Orang	100

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kaabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2000 goni	2000 goni	2000 goni	2000 goni	<b>100 %</b>	2000 goni	2000 goni	100
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi system komando penanganan darurat bencana	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	<b>100 %</b>	1 laporan	1 laporan	100
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>12 dokumen</b>	100
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	<b>100 %</b>	12 dokumen	12 dokumen	100

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014- 2019 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan Dokumen Penanggulangan Bencana Daerah	0,5	-	-	-	-
2.	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	0,10	0,10	53 Paket	18 Paket	15 Paket
3.	Cakupan Daerah Siaga Bencana	520	472	127	127	244
4.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana	10.712	4.100	9.400	2.000	2.000

5.	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	520	472	472	-	3940
6.	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	-	-	-	-	140.143
7.	Response time mencapai lokasi bencana	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam
8.	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai response time yang telah ditentukan	0,10	0,08		0,15	0,39
9.	Ketersediaan peta rawan bencana Kabupaten (Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Jumlah Kejadian Bencana					
	a. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
	b. Banjir	22	9	8	8	3
	c. Tanah Longsor	150	125	71	93	144
	d. Angin Puting Beliung	3	2	3	10	14
	e. Kebakaran Hutan	-	5	-	4	7
	f. Bencana Lainnya	-	2	4	3	20
11.	Nilai Kerugian Bencana					
	a. Jumlah korban meninggal/hilang (jiwa)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	b. Jumlah kerugian materi (Rp)	-	-	-	14.850.000.000	28.950.000.000
12.	Ketersediaan fasilitas pasca bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Persentase tim penanggulangan bencana terdidik	10	10	10	10	10

### Data Bencana Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 - 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian Bencana				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Tarutung	50	34	32	42	60
2	Kecamatan Sipoholon	11	3	4	6	13
3	Kecamatan Pagaran	7	4	1	8	8
4	Kecamatan Siborongborong	19	25	13	14	15
5	Kecamatan Siatas Barita	9	8	9	6	18
6	Kecamatan Adiankoting	9	3	2	2	5
7	Kecamatan Pahae Julu	8	16	3	5	10
8	Kecamatan Pahae Jae	18	3	4	8	11
9	Kecamatan Simangumban	3	-	-	3	8
10	Kecamatan Purbatua	6	10	1	5	3
11	Kecamatan Parmonangan	8	7	2	5	6
12	Kecamatan Sipahutar	8	9	3	1	5
13	Kecamatan Pangaribuan	5	6	2	6	7
14	Kecamatan Garoga	6	5	3	6	3
15	Kecamatan Muara	8	3	5	1	17

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD adalah:

1. Minimnya anggaran yang tersedia dalam penanggulangan bencana;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dan jumlah SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Banyaknya Laporan Kejadian Bencana yang tidak bisa ditanggulangi;

4. Rendahnya kepedulian dan pemahaman Masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah:

1. Keterbatasan dana/Anggaran yang dialokasikan belum memadai.
2. Sumber daya aparatur belum mencukupi
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana jika terjadi.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung penanggulangan bencana.
5. Letak Geografis daerah Kabupaten Tapanuli Utara sendiri yang merupakan kawasan yang sangat rawan akan bencana baik itu bencana gempa tektonik, longsor dan banjir

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang diselenggarakan melalui tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui RPJMD Kab. Tap. Utara Tahun 2019 - 2024 dan capaian program Nasional/Internasional.

Adapun tantangan yang dihadapi dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD adalah :

Tantangan yang dihadapi:

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif berupa pengurangan bencana yang terkandung dalam UU Nomor 24 Tahun 2008 BNPB sebagai Lembaga yang diamanatkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan fungsi merumuskan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisiensi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana , terpadu dan menyeluruh masih berusia sangat muda apalagi BPBD di daerah-daerah;

2. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ke tingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
3. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
4. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
5. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan Penanggulangan bencana.

sedangkan Peluang yang kita rasakan dengan terbentuknya BPBD di Kab. Tap. Utara terkait dengan UU No. 24 Tahun 2008 sebagai dasar Hukum yang menjamin tertanggannya isu penanggulangan bencana dan isu terkait lainnya, selain itu dengan kehadiran BNPB dan BPBD, penanggulangan bencana akan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpadu, menyeluruh dan efektif-efisien. Peluang selanjutnya adalah semakin bertumbuhnya perhatian dunia pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya semakin memburuk.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada rancangan awal RKPD dengan rencana kebutuhan dikaitkan dengan program/kegiatan BPBD perencanaannya dilakukan dengan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dan dilakukan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang tantangan dan kendala yang kemungkinan akan timbul. Perencanaan strategis adalah integritas antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pemanfaatan kondisi lingkungan yang

strategis dengan kata lain dengan keberadaan geografis Kabupaten Tapanuli Utara yang sangat rentan akan bencana maka sangat diperlukan pembenahan sarana dan prasarana sehingga akan memungkinkan meminimalis dampak yang terjadi. Dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan usulan BPBD setelah penentuan RKPD tidak begitu terjadi perbedaan semua usulan terakomodir di dalam rancangan awal RKPD tersebut.

Tabel 2.4  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.182.666.458	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.182.666.458	
2	Program Penanggulangan Bencana	Tapanuli Utara		100%	880.970.770	Program Penanggulangan Bencana	Tapanuli Utara		100%	880.970.770	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, adalah merupakan visi, misi dan agenda harapan atau keinginan (Nawa Cita) pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia Sejahtera, demokratis dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia . Prioritas Pembangunan Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui :

- √ Mekanisme Ekonomi
- √ Program pro rakyat (pro poor dan pro job)
- √ Program pendukung pembangunan berkelanjutan (pro enviroment), penurunan emisi gas rumah kaca, pengendalian pencemaran, penurunan laju kerusakan.
- √ Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
- √ Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan

Tugas pokok dan fungsi BPBD sangat terkait dengan kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

##### **Tujuan Renja SKPD**

Tujuan Renja SKPD adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun atau waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan administrasi Kantor
- b. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor
- c. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur
- d. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan produk penanggulangan bencana yang berkualitas.
- e. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintergrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana

- f. Mengembangkan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

### **Sasaran Renja SKPD**

Sasaran Renja SKPD adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan . Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran sebagai berikut ;

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
- b. Meningkatnya fasilitas pendukung sarana prasarana kantor bagi aparatur
- c. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kantor
- d. Meningkatnya informasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
- e. Meningkatnya sistem koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana
- f. Meningkatnya sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **a. Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan**

Faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan metode strategis untuk mendukung program Internasional dan Nasional yang terkait. Program merupakan penjabaran dari visi dan misi serta pilihan tindakan sesuai dengan manajemen risiko, visi penanggulangan bencana secara jelas menyebutkan cita-cita untuk menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana. Pertimbangan program didasarkan pada tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta membangun komitmen bersama Dinas/Instansi, Kantor dan Badan Pemerintah.

Ditingkat nasional ketertarikan berbagai pihak pada isu Penanggulangan resiko bencana ini terwujud dalam terbentuknya Platform Nasional penanggulangan resiko bencana dan

forum-forum serupa di daerah. Dengan adanya platform dan forum-forum ini, penanggulangan bencana dan resiko bencana menjadi urusan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan Perguruan Tinggi hal ini tentunya akan semakin memperkuat pelaksanaan pengurangan resiko bencana.

**b. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Rencana kerja BPBD dalam mencapai sasaran memiliki 2 program, 8 Kegiatan dan tertuang melalui 25 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kenderaann perorangan Dinas atau kenderaan dinas jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. Program Penanggulangan Bencana

### Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

### Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

### Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tapanuli Utara  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP)
							4	5	6	7	8	9	10
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Tapanuli Utara	100%	<b>4.063.637.228</b>				<b>3.813.232.742</b>
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Tapanuli Utara	100%	<b>3.182.666.458</b>			100%	<b>3.413.540.742</b>
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TerlaksananyaPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	100%	<b>41.007.300</b>			100%	<b>29.479.325</b>
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya pendukung untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tapanuli Utara	1 Dok	4.772.200	DAU		1 Dok	<b>4.772.050</b>

1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Belanja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	1 Dok	4.246.600	DAU		1 Dok	<b>4.246.475</b>
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Evaluasi kinerja	Tapanuli Utara	1 Dok	31.988.500	DAU		1 Dok	<b>20.460.800</b>
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	<b>Tapanuli Utara</b>	<b>100%</b>	<b>2.368.334.378</b>			100%	<b>2.727.974.836</b>
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	12 bln	2.321.987.278	DAU		12 bln	<b>2.682.127.636</b>
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan tersedianya jasa administrasi keuangan	Tapanuli Utara	12 bln	41.347.200	DAU		12 bln	<b>41.347.200</b>
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	12 bln	4.999.900	DAU		12 bln	<b>4.500.000</b>
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tapanuli Utara	12 bln	87.999.900	DAU		-	-
1	05	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan (PHL)	Tapanuli Utara	12 bln	87.999.900	DAU		-	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tapanuli Utara	100%	301.664.800	DAU		100%	<b>178.390.400</b>
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>01</b>	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	12 Bulan	10.186.100	DAU		12 Bulan	<b>9.601.500</b>

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Tapanuli Utara	12 Bulan	20.477.600	DAU		12 Bulan	<b>14.999.300</b>
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	Tapanuli Utara	12 Bulan	10.081.900	DAU		12 Bulan	<b>5.985.000</b>
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	Tapanuli Utara	12 Bulan	22.015.800	DAU		12 Bulan	<b>16.589.600</b>
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tapanuli Utara	12 Bulan	19.996.400	DAU		12 Bulan	<b>16.989.000</b>
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	12 Bulan	218.907.000	DAU		12 Bulan	<b>114.226.000</b>
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tapanuli Utara</b>	<b>100%</b>	<b>37.908.800</b>	DAU	-	-	-
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tapanuli Utara	100 %	9.701.400	DAU	-	-	-
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tapanuli Utara</b>	<b>100%</b>	<b>252.146.300</b>	DAU			<b>251.818.056</b>
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Sura Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	12 Bulan	2.000.000	DAU		12 Bulan	<b>1.200.000</b>
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumer Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumer Daya Air dan Listrik	Tapanuli Utara	12 Bulan	32.159.100	DAU		12 Bulan	<b>32.199.000</b>

1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapanuli Utara	12 Bulan	217.987,200	DAU		12 Bulan	<b>218.419.056</b>
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tapanuli Utara</b>	<b>100 %</b>	<b>181.604.800</b>	DAU		<b>100 %</b>	<b>225.878.125</b>
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Tapanuli Utara	8 Unit	81.042.500	DAU		8 Unit	189.583.700
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Tapanuli Utara	6 Unit	26.230.800	DAU		6 Unit	<b>21.200.725</b>
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Tapanuli Utara	1 Unit	6.058.100	DAU	-	-	-
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Tapanuli Utara	1 Unit	29.931.500	DAU		1 Unit	<b>15.093.700</b>
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>Tapanuli Utara</b>	<b>100 %</b>	<b>880.970.770</b>	DAU		<b>100 %</b>	<b>399.692.000</b>
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Tapanuli Utara</b>	<b>100 %</b>	<b>507.948.9</b>	DAU		<b>100 %</b>	<b>175.000.000</b>
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegaslisasi	Tapanuli Utara	100 %	513.049.000	DAU	-	-	-

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Tapanuli Utara	100 %	41.819.900	DAU	-	-	-
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Tapanuli Utara</b>	<b>100 %</b>	<b>227.932.670</b>	DAU		<b>100 %</b>	<b>175.000.000</b>
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Tapanuli Utara	100 %	5.000.000	DAU			-
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tapanuli Utara	6 Desa	156.998.500	DAU		9 Desa	75.000.000
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Tapanuli Utara	100 %	-	DAU		100 %	100.000.000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100 %	62.934.170	DAU	-	-	-
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Tapanuli Utara	100 %	3.000.000	DAU			

1	05	03	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Tapanuli Utara	100 %	95.169.200	DAU			
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Tapanuli Utara	100 %	5.000.000	DAU			
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Tapanuli Utara	12 Dokumen	76.869.200	DAU		12 Dokumen	76.000.000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Perjenis Kejadian Bencana	Tapanuli Utara	12 Bulan	3.000.000	DAU		12 Bulan	10.000.000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Koran Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tapanuli Utara	12 Bulan	9.000.000	DAU		12 Bulan	34.692.000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komandan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Tapanuli Utara	12 Bulan	1.300.000	DAU		-	-
1	05	03	2.04		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan</b>	<b>Tapanuli Utara</b>	<b>100 %</b>	<b>3.000.000</b>	DAU		<b>100 %</b>	<b>104.000.000</b>
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Tapanuli Utara	12 Dokumen	3.000.000	DAU		12 Dokumen	2.400.000
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Tapanuli Utara	-	-	DAU		12 Dokumen	20.000.000

1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehailitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Tapanuli Utara	-	-	DAU		70 Orang	81.600.000
---	----	----	------	------	---	--	----------------	---	---	-----	--	----------	------------

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendaanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024 dapat dijelaskan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
							<b>Tahun 2024</b>
Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif	Meningkatkan Akuntabilitasi Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %	100 %	3.302.807.998
			<u>Kegiatan:</u> Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Jumlah Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6 Dok</b>	<b>6 Dok</b>	<b>29.479.325</b>
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>6 Dok</b>	<b>6 Dok</b>	<b>4.772.050</b>
			<u>Sub Kegiatan :</u>	Jumlah Laporan Capaian	<b>2 Lap</b>	<b>2 Lap</b>	<b>4.246.475</b>

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			<b>Sub Kegiatan :</b> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja	12 Lap	12 Lap	20.460.000
			<b>Kegiatan :</b> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2.617.242.092</b>
			<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	2.571.394.892
			<b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Orang	70 Orang	41.347.200
			<b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70 Orang	70 Orang	4.500.000
			<b>Kegiatan :</b> <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>205.747.000</b>
			<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.601.500
			<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	14.999.300
			<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang	12 Bulan	12 Bulan	5.235.000

			Rumah Tangga	disediakan			
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	16.631.200
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	16.989.000
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	142.291.000
			<b><u>Sub Kegiatan :</u></b> <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>251.818.056</b>
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	1.200.000
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	12 Lap	32.199.000
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Lap	12 Lap	218.419.056
			<b><u>Kegiatan :</u></b> <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>198.521.525</b>
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit	162.227.100

			pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	21.200.725
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	15.093.700
	<b>Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana</b>	<b>Respon Time (1x24 Jam)</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>241.092.000</b>
		<b>Persentase bencana yang ditangani (88 Persen)</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			<b>75.000.000</b>
		<b>Jumlah Desa Tangguh Bencana (9 Desa)</b>	Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9 Desa	9 Desa	75.000.000
			Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	15 Kecamatan	15 Kecamatan	0
			<b>Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>143.692.000</b>

				lama 1X24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen LAPoran Kaji Cepat			
			<u>Sub Kegiatan :</u> Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	82.000.000
			<u>Sub Kegiatan :</u> Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	5 Orang	4.000.000
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Bulan	12 Bulan	57.692.000
			<b><u>Kegiatan :</u></b> <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>			22.400.000
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1Dokumen	20.000.000
			<u>Sub Kegiatan :</u> Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan			2.400.000

			<u>Sub Kegiatan :</u> Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya jumlah aparatur BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis didalam Menyusun dokumen kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P)	70 Orang	70 Orang	0
--	--	--	--	--	----------	----------	---



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2020-2024 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam perjalanannya dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana agar indikator yang ditetapkan dapat dicapai dengan mengukur kapasitas yang dimiliki serta target yang ditetapkan dapat tercapai dan tertuju tepat bagi penerima manfaat yang seharusnya.

Demikian Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
KEPALA PELAKSANA,**



**BONGGAS FREDDY PASARIBU, S.Pt  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196711211998031002**